

**ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PERIODE 2013-2017**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : Dwi Lestari

Nomor Mahasiswa : 144214929

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

**ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PERIODE 2013-2017**

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Disusun Oleh:

Nama : Dwi Lestari

Nomor Mahasiswa : 144214929

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

**ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PERIODE 2013-2017**

Nama : Dwi Lestari
Nomor Mahasiswa : 144214929
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Telah di setujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing

Dra. Sulastiningsih,M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Widya Wiwaha

Nama : Dwi Lestari

Nomor Mahasiswa : 1442149292

Program Studi : Akuntansi

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Disahkan oleh

Penguji/ Pembimbing Skripsi :

Penguji 1 :

Penguji 2 :

Mengetahui

Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan,MM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi atau karya yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain kecuali pada bagian bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penulis

Dwi Lestari

MOTTO

- Harta yang tak pernah habis adalah ilmu pengetahuan dan ilmu yang tak ternilai adalah Pendidikan.
- Belajar dan bekerja dengan giat, serta tidak lupa bersyukur, tentu akan memberikan hasil yang baik.
- Sabar adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat.
- Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas.
- Hari ini berjuang, besok raih kemenangan.
- Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin.

STIE Widya Wihwana
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu saya Suratiyah (Alm) terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti.
2. Bapak saya Legiyo terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dunia akhirat.
3. Kakakku Ariyadi serta Mbakku yang selalu memberikan semangat serta dukungan. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada mereka.
4. Heri irawan yang selalu memberikan semangat serta dukungan yang selalu membuatku termotivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Mbak kustanti terimakasih atas bantuan, nasehat, hiburan serta semangat, semoga keakraban ini selalu terjaga dengan baik.
6. Mbak daniyati terimakasih atas bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul: “Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2017” dengan lancar. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan brbaagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs.Muhammad Subhan, MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
2. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini,SE,MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Dra.Sulastiningsih,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan perhatiannya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf di lingkungan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan pengajaran, ilmu pengetahuan, dan pengalaman selama penyusun menuntut ilmu.
5. Bapak, Kakak, Mbak yang selalu memberikan doa serta mencurahkan kasih sayang dan semangat kepada penulis.

6. Mbak Kustanti dan Mbak Daniyati yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Heri Irawan yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan saran serta kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki skripsi maupun bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penulis

Dwi Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Batasan Masalah.....	6

1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Dasar Teori.....	9
2.1.1 Kinerja Keuangan.....	9
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	14
2.1.3 Anggaran Pemerintah.....	15
2.1.4 Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.....	22
2.1.5 Realisasi Anggaran.....	26
2.1.6 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	28
2.1.7 Belanja Daerah.....	30
2.1.8 Analisis Rasio Keuangan.....	33
2.2 Kerangka Penelitian.....	37
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2 Objek Penelitian.....	41

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.....	45
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	48
4.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017.....	48
4.2.2 Pendapatan Daerah.....	49
4.2.3 Pajak Daerah.....	50
4.2.4 Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo.....	51
4.3 Analisis Data dan Pembahasan.....	51
4.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi.....	52
4.3.2 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah.....	53
4.3.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	55
4.3.4 Rasio Keserasian Belanja Daerah.....	56
4.3.5 Pembahasan.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	29
TABEL 2.2 Tingkat Desentralisasi dan Kemampuan Keuangan.....	34
TABEL 2.3 Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah.....	35
TABEL 2.4 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	36
TABEL 2.5 Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	39
TABEL 4.1 APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 (dalam rupiah).....	48
TABEL 4.2 Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo 2013-2017 (dalam rupiah)...	49
TABEL 4.3 Realisasi Pembentuk Pendapatan Daerah (dalam rupiah).....	50
TABEL 4.4 Anggaran Pendapatan Pajak Daerah (dalam rupiah).....	50
TABEL 4.5 Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal (dalam rupiah).....	51
TABEL 4.6 Rasio Desentralisasi (dalam rupiah).....	53
TABEL 4.7 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (dalam rupiah).....	54
TABEL 4.8 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (dalam rupiah).....	55
TABEL 4.9 Rasio Keserasian Belanja Daerah (dalam rupiah).....	57
TABEL 4.10 Ringkasan Analisis Rasio Keuangan selama periode 2013-2017.....	59

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis Rasio Keuangan Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013—2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pelaksanaan APBD pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilihat dari Rasio Desentralisasi dapat dikatakan rendah dengan rata-rata 13,57%. Dilihat dari Rasio Efektifitas selama lima periode (2013-2017) penerimaan target pajak daerah telah efektif dengan rata-rata sebesar 103,12%. Rasio Efisiensi Belanja masih kurang efisien dengan rata-rata 92,59%, perlu adanya peningkatan. Rata-rata Keserasian belanja operasi sebesar 82,34% dan Belanja modal sebesar 17,51%, menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Kulon Progo dalam memprioritaskan alokasi dananya masih perlu ditingkatkan kembali agar lebih optimal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, Rasio Keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang

bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui penyusunan APBD. Sebagai rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, masyarakat atau publik merupakan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya anggaran daerah atau APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Penyelenggaraan anggaran daerah memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, namun harus merupakan suatu kebersamaan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam arti luas (meliputi perwakilan dari warga, pemuka adat, tokoh masyarakat, kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)). Kesadaran bahwa penyelenggaraan anggaran daerah merupakan amanat rakyat menjadi sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

Pelaksanaan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada beberapa daerah dengan sumberdaya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa

daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Didasari bahwa sumber-sumber penerimaan antara satu daerah dengan lainnya sangat beragam. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK). Disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pembangunan daerah sebagai suatu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya

manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan di dukung dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 yang kemudian di revisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menyebabkan perubahan terhadap bentuk dan struktur APBD terutama pada struktur belanja. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam APBD yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan

(*continuous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bias memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi (Mahsun, 2006:145).

Analisis Keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban kepada publik. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat penting karena merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran. Analisis tersebut akan menunjukkan seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:230). Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum berjalan dengan baik dan efisien dalam menggunakan anggaran belanja, dilihat dari Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Periode 2011-2012 yaitu pada tahun 2011 Efisiensi Belanja yang dicapai sebesar 92,70% dan rasio Efisiensi Belanja tahun 2012 sebesar 94,56%. Dilihat dari kedua rasio keuangan tersebut, pemerintah daerah belum dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul : “ **Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2017 belum optimal.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah: “Bagaimana kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2017?”

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya menekankan pada permasalahan mengenai penilaian kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) yang dilihat dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013-2017. Adapun data yang di pakai adalah Anggaran dan Laporan Realisasi APBD periode 2013-2017.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pelaksanaan APBD pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan

Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar teori yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian Kinerja Keuangan, Anggaran Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Realisasi Anggaran.

2.1.1 Kinerja Keuangan

Informasi akuntansi sangat bermanfaat untuk menilai pertanggungjawaban kinerja manajer. Karena penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemungkinan yang lain adalah digunakannya informasi akuntansi bersamaan dengan informasi non akuntansi untuk menilai kinerja manajer atau pimpinan perusahaan.

Menurut Sedarmayanti (2011:260) definisi kinerja adalah: "*Performance* atau kinerja adalah hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan)."

Menurut Hayadi dan Kristiani (2007:103) definisi kinerja adalah: "Kinerja merupakan

gambaran tingkat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi”. Menurut Wibowo (2010:7) “Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.”

Dari definisi di atas disimpulkan bahwa istilah kinerja sering dipakai untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Bentuk dari pengukuran kinerja keuangan tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut Mardiasmo (2004:121) Pengukuran Kinerja Keuangan dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan:

- a. Untuk membantu memperbaiki Kinerja Keuangan pemerintah.
- b. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggung jawab manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan menurut Mulyadi (2005:418) adalah sebagai berikut: “Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba”.

Menurut Sucipto (2007:29) definisi kinerja keuangan adalah sebagai berikut: “Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen”. Oleh karena itu untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif.

Menurut Bastian (2006:276-277) aspek-aspek Kinerja Keuangan diukur sebagai berikut:

- a. Aspek finansial
- b. Kepuasan pelanggan
- c. Operasi dan bisnis internal
- d. Kepuasan pegawai
- e. Kepuasan komunitas dan stockholder/stakeholder
- f. Waktu

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34) adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas.

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.

2. Mengetahui tingkat solvabilitas.

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Mengetahui tingkat rentabilitas.

Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

4. Mengetahui tingkat stabilitas.

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap reviewe data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi (Jumingan, 2006:242):

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan

merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (*absolut*) maupun dalam persentase (*relatif*).

2. Analisis Tren (tendensi posisi)

merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

3. Analisis Persentase per-Komponen (*common size*)

merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.

6. Analisis Rasio Keuangan

merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.

7. Analisis Perubahan Laba Kotor

merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.

8. Analisis Break Even

merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (UU No.15 Tahun 2014).

Menurut Mardiasmo, (2002:105) dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip-prinsip:

a. *Transparance* (Transparasi)

Yaitu adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai keuangan daerah, dan memberikan kebebasan memperoleh informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.

b. *Efficient* (Efisien)

Yaitu setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output atau income tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.

c. *Effective* (Efektif)

Yaitu dalam implementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.

d. *Accountability* (Akuntabilitas)

Yaitu Kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib di pertanggungjawabkan kepada semua elemen masyarakat. Secara institusional pertanggungjawaban dilakukan kepada legislative (DPRD) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.

e. *Participative* (Partisipatif)

Yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/ kritikan, dan masukan yang konstruktif terhadap system pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel.

2.1.3 Anggaran Pemerintah

A. Pengertian Anggaran

Menurut Gomes (1995:87-88), "Anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi

mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut.”

Menurut Mulyadi (2001:488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Menurut Nafarin, (2000:11), “anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa”. Menurut Sofyan (1996:14) “anggaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen”.

Dari beberapa pengertian anggaran yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu. Sedangkan Anggaran Pemerintah adalah dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang seringkali diluluskan oleh legislatur, diterima oleh presiden dan disajikan oleh menteri keuangan. Dokumen ini memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran negara yang telah diantisipasi untuk tahun finansial yang sedang berjalan.

Tipe Anggaran pemerintah bisa dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: (

- a) Anggaran seimbang: saat penerimaan dan pengeluaran pemerintah adalah sama.
- b) Anggaran surplus: saat penerimaan yang telah diantisipasi ternyata melebihi pengeluaran.
- c) Anggaran defisit: saat pengeluaran yang telah diantisipasi ternyata lebih besar daripada penerimaan. (Sumber: Scribd.com)

B. Fungsi Anggaran

Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2004: 63) fungsi anggaran yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran di buat untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah menyusun anggaran untuk merencanakan tindakan yang dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan hasil apa yang hendak di capai dari belanja pemerintah tersebut. Sebagai alat perencanaan, anggaran di susun agar kebijakan sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Kebijakan anggaran tersebut berupa program dan kegiatan yang sesuai tujuan

pemerintah dan dialokasikan pendanaannya beserta indikator kinerja dan target pencapaian strategis yang diharapkan.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai alat pengendali, diharapkan meminimalisir kesalahan alokasi anggaran seperti overspending atau underspending. Anggaran juga alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiskal Tool*)

Anggaran dapat digunakan untuk menstabilkan, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran sektor publik disusun atas kesepakatan legislatif dan eksekutif. Dalam proses mencapai persetujuan anggaran publik diperlukan keahlian politik, negosiasi, koalisi dan pemahaman prosedur manajemen keuangan sektor publik. Anggaran yang telah disahkan merupakan dokumen publik yang harus dijalankan oleh eksekutif dengan sebaik-baiknya. Apabila anggaran tidak dilaksanakan dengan baik maka kredibilitas pemerintah dapat menurun dan instrumen anggaran dapat menjadi alat menekan pemerintahan. Minimal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintah secara berjenjang terlibat dalam penyusunan anggaran. Oleh karena itu anggaran perlu disusun dengan perencanaan dan koordinasi yang baik dalam suatu sistem terpadu. Hal ini dilakukan agar program dan rencana kerja anggaran dapat dipantau kinerjanya dan terhindar dari duplikasi. Kemudian agar program dan kegiatan yang disusun dalam anggaran dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dikomunikasikan ke seluruh unit dalam suatu organisasi.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Pengertian kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran disusun dengan target yang terukur dan dapat dilaksanakan. Dalam perencanaan terdapat target dan tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu target yang hendak dicapai hendaknya tidak terlalu tinggi (*ambisius*) namun juga tidak terlalu mudah untuk dilaksanakan. Informasi (*input*) yang diperoleh dari evaluasi kinerja anggaran juga dapat menjadi dasar pemberian insentif (*stick and carrot*) bagi pekerja.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Publik Share*)

Seluruh komponen masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan anggaran sektor publik. Masyarakat umum, LSM, asosiasi dan akademisi dapat menyampaikan aspirasinya. Hal ini penting karena dalam pelaksanaannya anggaran berdampak langsung pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tugas pemangku kepentingan dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini dengan skala prioritas sesuai visi misi pemerintahan.

C. Jenis Anggaran

Bastian, (2006: 166-171) mengemukakan jenis anggaran pemerintah sebagai berikut:

1. Line-Item Budgeting

Model ini merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga dikenal tradisional budgeting. Organisasi bisnis maupun sector publik pada umumnya menggunakan model ini dalam penyusunan anggaran karena model ini relatif mudah dan sederhana.

2. Incremental Budgeting

Penganggaran dengan metode Incremental Budgeting pada dasarnya menggunakan line-item budgeting, tetapi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi nilai anggarannya dari tahun sebelumnya.

3. Planning Program Budgeting System (PPBS)

Model PPBS dikembangkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model-model manajemen keuangan yang ada. Di dalam model ini digunakan cost and benefit analisis.

4. *Zero-Based Budgeting* (ZBB)

Sesuai dengan namanya, anggaran disusun dari NOL meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan proses penganggaran.

5. *Performance Budgeting*

Metode Performance Budgeting, anggaran disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur dengan (measurable performance) dari berbagai kegiatan. Faktor penentu dalam metode ini efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standar biaya (*cost standart*).

D. Prinsip-prinsip Anggaran

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009:67) meliputi:

1. Otorisasi oleh *legislative* yaitu anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. *Komprehensif*, yaitu anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah

3. Keutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
4. *Nondiscretionary appropriation*, yaitu jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien.
5. Periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang *periodic* dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan
6. Akurat, yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
7. Jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
8. Diketahui publik, yaitu anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

E. Penyusunan Anggaran

Anggaran dapat terlaksana dengan baik apabila anggaran tersebut disusun secara baik pula. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan rangkaian proses anggaran. Mardiasmo (2004: 68) mengungkapkan tujuan proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiscal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Dan Daerah (APBD)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 th 2003 tentang Peraturan Daerah, Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

A. Landasan Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Landasan hukum penyusunan APBD yaitu:

- a) Undang-undang No.32 Tahun 2003 tentang Pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Undang-undang No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang perlu diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang jelas.
- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan penghitungan APBD. Dalam keputusan ini pemerintah menetapkan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah, pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala daerah, Bendahara umum daerah adalah pejabat yang di beri kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum penegelolaan keuangan daerah.
- d) PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD.

B. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Adapun tujuan APBD yang lain antara lain:

- a) Membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. Dengan keadaan ekonomi yang baik diharapkan sektor usaha mengalami kemajuan dan kesempatan kerja meningkat.
- b) Meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah. Alat koordinasi dan komunikasi menjadi alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah sebab proses penyusunan anggaran melibatkan setiap unit kerja pemerintah.
- c) Membantu menghadirkan dan menciptakan efisiensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum. Hal ini untuk memberikan motivasi dalam bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- d) Menghadirkan dan Meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

C. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- a) Fungsi Otoritas

Fungsi otorisasi adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.

b) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan, berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

d) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi, berfungsi sebagai pedoman dalam pembagiannya harus diarahkan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi/efektivitas ekonomi.

e) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi, berfungsi dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Sumber: sumberilmuhukum.com)

2.1.5 Realisasi Anggaran

Menurut Prasetya (2010:6) “Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang – undangan.” Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,

dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Pusat/ Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Unsur – unsur yang mencakup secara langsung dalam LRA menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan (2009:21) terdiri dari:

1. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
2. Pendapatan (Basis Akrua) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.

4. Belanja (Basis Akrua) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah Penerimaan/ Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (*financing*) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran.
7. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

2.1.6 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005) dapat dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

No.	Uraian	Jumlah
1.	PENDAPATAN DAERAH	
2.	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	
3.	- Hasil Pajak Daerah	
4.	- Hasil Retribusi Daerah	
5.	- Hasil Pengelolaah Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6.	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
7.	<i>Dana Perimbangan</i>	
8.	- Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
9.	- Dana Alokasi Umum	
10.	- Dana Alokasi Khusus	
11.	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	
12.	- Pendapatan Hibah	
13.	- Dana Darurat	
14.	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	
15.	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
16.	- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PemDa Lainnya	
17.	JUMLAH PENDAPATAN	
18.	BELANJA DAERAH	
19.	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	
20.	- Belanja Pegawai	
21.	- Belanja Bunga	
22.	- Belanja Subsidi	
23.	- Belanja Hibah	
24.	- Belanja Bantuan Sosial	
25.	- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota/dan PemDesa	
26.	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan PemDesa	
27.	- Belanja Tak Terduga	
28.	<i>Belanja Langsung</i>	
29.	- Belanja Pegawai	
30.	- Belanja Barang Jasa	
31.	- Belanja Modal	
32.	JUMLAH BELANJA	
33.	SURPLUS (DEFISIT)	
34.	PEMBIAYAAN DAERAH	
35.	<i>Penerimaan Pembiayaan Daerah</i>	

36.	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	
37.	- Pencairan Dana Cadangan	
38.	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
39.	- Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
40.	- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
41.	- Penerimaan Piutang Daerah	
42.	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	
43.	<i>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</i>	
44.	- Pembentukan Dana Cadangan	
45.	- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
46.	- Pembayaran Pokok Utang	
47.	- Pemberian Pinjaman Utang	
48.	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	
49.	<i>Pembiayaan Netto</i>	
50.	- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	

Sumber: Pemerintah RI No.24 tahun 2005

2.1.7 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu: (Sumber: Scribd.com)

1.) Belanja Administrasi Umum

adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas 4 jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

4. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

2.) Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja Perjalanan

Belanja Pengeluaran merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

4. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

3.) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja Publik

Belanja Publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh: belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa dan pemeliharaan mobil ambulans.

2. Belanja Aparatur

Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Contoh: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

4.) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- Angsuran Pinjaman
- Dana Bantuan
- Dana cadangan

5.) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

2.1.8 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Menurut Irawati (2005:22) Rasio

Keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan baik daftar neraca maupun laba rugi.

Beberapa Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah (Halim,2007) antara lain:

a. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Rumus:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Tingkat Desentralisasi dan Kemampuan Keuangan

Kemampuan Keuangan	Desentralisasi (%)
Sangat Kurang	0,00 – 10,00
Kurang	10,01 – 20,00
Sedang	20,01 – 30,00
Cukup	30,01 – 40,00
Baik	40,01 – 50,00
Sangat Baik	> 50,00

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim 2007:234).

Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Target Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 2.3

Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan mengukur anggaran belanja. Rasio Efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel. 2.4

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

d. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rumus:

- Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

Total Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Total Belanja Daerah

- Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Halim, (2002:126) hasil analisis Rasio Keuangan bertujuan untuk:

- Menilai Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapat daerah.
- Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapat daerahnya.
- Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapat dalam pembentukan pendapatan daerah.
- Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

2.2 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:389) “Kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi

dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jika dihubungkan dengan sebuah instansi pemerintah maka kinerja keuangan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dalam penggunaan anggaran yang menunjukkan seberapa efisiennya daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis Kinerja Keuangan APBD dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu Analisis kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Analisis Keuangan Belanja Daerah. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Tingginya tingkat kemandirian daerah maka semakin baik juga kualitas pelayanan publiknya.

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dapat dinilai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan dapat dihitung dengan cara analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dan Analisis Rasio Keuangan yang meliputi Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi pajak Daerah, dan Derajat Kontribusi BUMD.

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien, dan ekonomis pemerintah daerah telah menggunakan APBD. Berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dengan cara Analisis Varians Keserasian Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, analisis Keserasian Belanja Daerah, dan Analisis Efisiensi Belanja Daerah.

Melihat Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Belanja Daerah, maka dapat dinilai Kinerja Keuangan APBD secara umum, jika semua Kinerja

Keuangan tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan Kinerja Keuangan APBD adalah baik.

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyesuaian skripsi ini. Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.5

Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Kesimpulan
1.	Akram arif nugroho (2012)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Boyolali APBD 2008-2010	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan 	Rasio keuangan menunjukkan bahwa rasio kemandirian mengalami kenaikan, rasio efektivitas menunjukkan realisasi penerimaan PADnya telah dapat melalui anggaran yang di tetapkan .
2.	Daling (2013)	Analisis kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kinerja • Anggaran Pendapatan • Belanja Daerah 	Kinerja pendapatan pada pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara

				belum efektif sedangkan untuk kinerja belanja telah efektif.
3.	Yudha wahyu setyawan (2013)	Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sragen tahun anggaran 2010-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan 	Berdasarkan BPK pemerintah kabupaten Sragen antara tahun 2010-2012 mempunyai kemampuan yang sangat baik karena nilai rasio yang di dapat selalu di atas 100%.
4.	Bahrin assidiqi (2014)	Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Klaten tahun 2008-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan • Anggaran pendapatan • Belanja daerah 	Kinerja keuangan pendapatan daerah kabupaten Klaten dilihat dari varians pendapatan daerah kabupaten Klaten di katakana baik dan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

5.	Pertiwi Kundalini (2014)	Analisis laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten Kulon Progo periode 2011-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran pendapatan • Belanja daerah 	Kinerja keuangan APBD pemerintah kabupaten Kulon Progo sudah baik tetapi perlu ditingkatkan.
----	--------------------------	---	---	--

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Penelitian ini tidak berpusat di satu tempat yang biasanya menjadi objek penelitian karena data yang di peroleh merupakan data sekunder yang di peroleh melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) serta data pendukung lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan data pendukung yang berasal dari literatur – literatur lain. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

3.2 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah data keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 sampai tahun 2017.

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang di kumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2013-2017.

Menurut Sugiyono (2014:62), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang di tempuh dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak di peroleh dalam observasi dan wawancara. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa gambaran umum kota kabupaten akulon Progo tahun anggaran 2013-2017 serta data lain yang di perlukan terkait dengan metode analisis yang di gunakan.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Nasir (2009: 124) bahwa analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk di baca. Menurut Spradley dalam Sugiono (2011: 244) menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun adalah cara berfikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan atau dengan makna bahwa analisis untuk mencari pola.

Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2013-2017. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu data atau informasi yang berbentuk angka-angka

yang kemudian ditarik kesimpulan dengan jelas membandingkan satu dengan yang lain dengan perhitungan kuantitatif. Adapun Teknik analisis data yang dilakukan adalah

1. Menghitung rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2017 yang meliputi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Aktivitas berdasarkan Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo selama periode 2013-2017.
2. Menganalisa hasil perhitungan rasio keuangan Pemerintah kabupaten Kulon progo periode 2013-2017.
3. Menyimpulkan hasil perhitungan rasio keuangan Pemerintah kabupaten Kulon progo periode 2013-2017.

Beberapa Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah (Halim, 2007:76) antara lain:

- e. Rasio Desentralisasi Fiskal

Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Total Pendapatan Daerah

- f. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Target Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Target Pendapatan PAD

g. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

h. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

- Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

STIE Widya Winaha
Jangan Plagiat

BAB IV

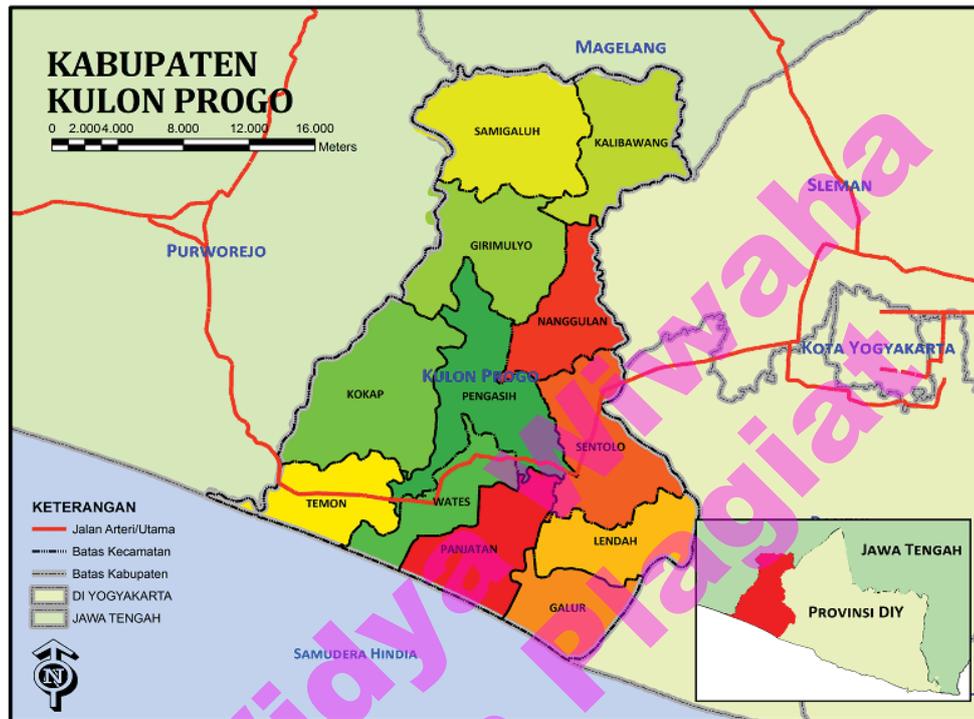
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten/kota yang terdapat di bagian barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikepalai oleh seorang Bupati yaitu: dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.Og. Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 km²), terdiri dari 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 917 pedukuhan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Provinsi DIY, di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa. kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak di antara 7° 38' 42" – 7° 59' 3" lintang selatan dan 110° 1' 37" – 110° 16' 26" Bujur Timur. Batas – batas kabupaten tersebut adalah:

- a. Batas bagian selatan merupakan Samudra Indonesia
- b. Batas bagian timur merupakan Kabupaten Sleman dan Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta
- c. Batas bagian barat merupakan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
- d. Batas bagian Utara merupakan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.1 Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Atlas Kulon Progo

Kondisi Geohidrologi di Kabupaten Kulon Progo sangat bervariasi mengikuti geomorfologi dan geologinya. Pada wilayah tengah dan utara, yang merupakan bagian dari sistem perbukitan Menoreh, memiliki potensi air yang rendah. Kemiringan lereng yang terjal menyebabkan air hujan yang diterima permukaan tanah cepat mengumpul di saluran-saluran sungai dan mengalir di daerah hilir. Pada kondisi seperti ini air hujan tidak sempat terinfiltrasi ke dalam tanah dalam jumlah yang cukup. Kondisi hidrologi di wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo, memiliki kemiringan relatif datar dan

secara geomorfologis merupakan wilayah dataran alluvial dari beberapa hilir sungai dan sekaligus merupakan wilayah pesisir.

Ketersediaan air permukaan di Kabupaten Kulon Progo banyak dipengaruhi oleh aliran beberapa sungai. Sungai progo merupakan sungai terbesar yang memberikan suplay air permukaan di Kabupaten Kulon Progo. Air dari sungai ini terutama banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Selain sungai Progo, terdapat beberapa aliran sungai yang mengalir di Kabupaten Kulon Progo, seperti Sungai Tinalah di Kecamatan Samigaluh dan Sungai Kayangan di Kecamatan Girimulyo. Hilir Sungai Tinalah berakhir di Dusun Semaken, Banjararum dan bertemu dengan Sungai Progo. Sama halnya dengan Sungai Tinalah, Sungai Kayangan juga berakhir masuk ke aliran sungai Progo.

Kabupaten Kulon Progo relatif mudah dijangkau dengan menempuh jalur darat dari arah barat, timur maupun utara karena letaknya yang berada ditengah pulau Jawa. Tersedia sebuah stasiun dan terminal yang terletak di ibukota Kabupaten, yaitu Stasiun Wates dan Terminal Wates. Direncanakan setelah pembangunan Bandara baru nantinya stasiun dan terminal baru akan diintegrasikan dengan bandara tersebut. Pemerintah pusat telah mengindikasikan bahwa bandara baru yaitu Bandar Udara Internasional Yogyakarta untuk Daerah Istimewa Yogyakarta akan berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Rencananya adalah untuk membangun sebuah bandara dengan landasan pacu 3.600 meter yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh melalui BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan data pendukung lainnya. Objek penelitian ini adalah data keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017.

4.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Berikut ini merupakan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2017:

Tabel 4.1 APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	APBD		Surplus/Defisit
	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	
2013	981.651.367.999,43	1.044.129.375.836,31	(62.487.007.837)
2014	1.088.812.577.061,41	1.174.629.041.137,61	(85.816.464.076)
2015	1.221.514.214.334,50	1.251.716.432.371,55	(30.202.218.037)
2016	1.378.759.900.977,90	1.333.090.628.196,42	45.669.272.781
2017	1.440.881.554.674,81	1.341.233.225.981,65	99.648.328.693

Sumber : BPKAD Kab. Kulon Progo

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, APBD Kabupaten Kulon Progo lebih memperbanyak Anggaran Belanja daripada Anggaran Pendapatan. Pada tahun 2016 dan 2017, APBD Kabupaten Kulon Progo lebih besar anggaran Pendapatan daripada Anggaran Belanja. Hal ini terlihat dari surplus tahun 2016 sebesar Rp. 45.669.272.781 dan defisit tahun 2017 sebesar Rp. 99.648.328.693.

Tabel 4.2 Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo 2013-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi APBD		Surplus/Defisit
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	
2013	1.003.179.221.523,06	963.446.378.014,94	39.732.843.508
2014	1.120.424.776.127,66	1.060.577.348.170,60	59.847.427.957
2015	1.227.476.672.766,37	1.142.545.631.178,06	84.931.041.588
2016	1.358.070.874.847,32	1.249.917.168.464,00	108.153.706.383
2017	1.425.110.286.517,18	1.273.152.920.188,17	151.957.366.329

Sumber: BPKAD Kab. Kulon Progo

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo surplus masing-masing sebesar Rp. 39.732.843.508, Rp.59.847.427.957, Rp 84.931.041.588, Rp.108.153.706.383, Rp. 151.957.366.329.

4.2.2 Pendapatan Daerah

Halim (2007:99) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemda.

Tabel 4.3 Realisasi Pembentuk Pendapatan Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2013	95.991.512.851,06	886.199.003.148,00	20.988.705.524,00
2014	158.623.776.127,66	934.001.271.245,47	27.799.577.543,00
2015	170.822.326.588,34	1.054.106.257.006,03	2.546.089.202,00
2016	180.273.363.594,69	1.161.030.011.704,63	16.767.499.548,00
2017	249.692.648.563,65	1.092.383.136.158,53	83.034.501.795,00
Total	855.403.627.725	5.127.719.679.263	151.136.373.612,00

Sumber : BPKAD Kab. Kulon Progo

4.2.3 Pajak Daerah

Mardiasmo (2005:5): “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan Pajak Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
2013	7.633.177.800,00	8.696.477.331,88
2014	20.447.388.961,66	21.171.477.417,00
2015	22.867.137.517,18	25.526.938.958,50
2016	88.042.121.948,50	31.393.835.053,70
2017	43.024.098.351,29	47.237.503.606,60
Total	182.013.924.579	134.026.232.368

Sumber: BPKAD Kab.Kulon Progo

4.2.4 Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo

Belanja Operasi dan Belanja Modal merupakan pos-pos penyusun belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut ini merupakan tabel Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017:

Tabel 4.5 Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal
2013	839.661.393.337,94	123.313.526.117,00
2014	911.307.200.058,60	146.576.953.515,00
2015	916.292.935.774,06	226.055.713.904,00
2016	1.005.681.962.716,00	241.983.753.198,00
2017	1.013.400.077.159,68	258.766.459.024,49
Total	4.686.343.569.046,2	996.696.405.758,49

Sumber: BPKAD Kab. Kulon Progo

Dari tabel diatas menunjukkan jika realisasi belanja operasi lebih besar dari realisasi belanja modal pada semua tahun yang dibandingkan. Total realisasi belanja operasi dari lima tahun bersangkutan sebesar Rp 4.686.343.569.046,2, sedangkan total realisasi belanja modal sebesar Rp 996.969.405.758,49.

4.3 Analisis Data dan Pembahasan

Kinerja keuangan yaitu tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran Kinerja Keuangan tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Analisis rasio keuangan adalah suatu proses yang mengidentifikasi ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dengan menggunakan analisis rasio pada laporan keuangan (analisis rasio keuangan) dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat keuntungan suatu perusahaan (profitability perusahaan). Untuk dapat menentukan atau mengukur hal-hal tersebut diperlukan alat pembanding dan rasio dalam industry sebagai keseluruhan yang sejenis di mana perusahaan menjadi anggotanya dapat digunakan sebagai alat pembanding dari angka rasio suatu perusahaan (Munawir,2007:65).

4.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Mahmudi, (2010:142) mengatakan bahwa “Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berikut ini merupakan hasil perhitungan Rasio Desentralisasi:

Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.6 Rasio Desentralisasi (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi (%)	Derajat Desentralisasi
2013	78.430.504.348,93	981.651.367.999,43	7,98 %	Kurang
2014	131.892.992.136,75	1.088.812.577.061,41	12,11 %	Kurang
2015	155.969.689.703,30	1.221.514.214.334,50	12,76 %	Kurang
2016	220.379.806.602,35	1.378.759.900.977,90	15,98 %	Kurang
2017	242.829.753.091,61	1.440.881.554.674,81	16,85 %	Kurang
Total	829.502.745.883	6.111.619.615.048,05	13,57 %	Kurang

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dikatakan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017 masih kurang yang ditunjukkan dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 13,57%. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 16,85%, sedangkan Derajat Desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 7,98%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan baik.

4.3.2 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Utama,(2008:27) Rasio Efektifitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dalam satuan persen. Rasio Efektifitas dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal

100%. Berikut ini hasil perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017:

Realisasi Pendapatan PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Target Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Target Pendapatan PAD

Tabel 4.7 Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Rasio Efektifitas
2013	95.991.512.851,06	78.430.505.348,93	122,39 %	Sangat Efektif
2014	158.623.927.339,19	131.892.992.136,75	120,26 %	Sangat Efektif
2015	170.822.326.558,34	155.969.689.703,30	109,52 %	Sangat Efektif
2016	180.273.363.594,69	220.379.806.602,35	81,80 %	Kurang Efektif
2017	249.692.648.563,65	242.829.753.091,61	102,82 %	Sangat Efektif
Total	855.403.778.906,93	829.502.746.882,94	103,12 %	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas Rasio Efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%. Pada tahun 2016 penerimaan daerah masih kurang baik karena dalam perbandingan antara penerimaan dan target menunjukkan angka 81,80% masih belum memenuhi syarat minimal 100%. Pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 penerimaan target pajak daerah telah efektif dengan persentase terhadap

target penerimaan telah sesuai target yang dianggarkan. Secara umum rata-rata rasio efektifitas Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2017 dikatakan baik karena telah mencapai angka rata-rata sebesar 103,12%

4.3.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satuan persen (Utama,2008:30). Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Berikut hasil perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.8 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria Rasio Efisiensi
2013	964.587.545.892,94	1.045.277.844.864,41	92,28 %	Kurang Efisien
2014	1.060.577.348.170,60	1.174.629.041.137,61	90,29 %	Kurang Efisien
2015	1.142.545.631.178,06	1.251.716.432.371,55	91,27 %	Kurang Efisien
2016	1.249.917.168.464,00	1.333.090.628.196,42	93,76 %	Kurang Efisien
2017	1.273.152.920.188,17	1.341.233.225.981,65	94,92 %	Kurang Efisien
Total	5.690.780.613.893,77	6.145.947.172.551,64	92,59 %	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas Rasio Efisiensi dikatakan efisien apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%, jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Pada tahun 2013 belum terjadi efisiensi untuk Kinerja Keuangan Daerah, hal ini terlihat dari Rasio Efisiensi Belanja yang mencapai 92,28%. Pada tahun 2014 Rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 90,29%, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih belum efisien. Sedangkan pada tahun 2015-2017 Rasio Efisiensi Belanja terus mengalami kenaikan namun masih dikatakan baik karena masih dibawah kriteria 100%. Rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017 yaitu 92,59% berada > 90%-100%, hal ini mengindikasikan Kinerja Keuangan belanja Pemerintah sudah baik tetapi harus ditingkatkan kembali.

4.3.4 Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian Belanja Daerah terbagi menjadi dua rasio yaitu: Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja. Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara belanja operasi dengan total belanja daerah (mahmudi,2010:164). Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (*recurrent*).

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi,2010:165). Pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Berikut ini hasil perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2017:

- Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Total Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Total Belanja Daerah

Tabel 4.9 Rasio Keserasian Belanja Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Belanja Modal terhadap Total Belanja	Rasio Keserasian	
			Belanja Operasi	Belanja Modal
2013	839.661.393.337,94	123.313.526.117,00	87,04 %	12,78 %
	964.587.545.892,94	964.587.545.892,94		
2014	911.307.200.058,60	146.576.953.515,00	85,92 %	13,82 %
	1.060.577.348.170,60	1.060.577.348.170,60		
2015	916.292.935.774,06	226.055.713.904,00	80,19 %	19,78 %
	1.142.545.631.178,06	1.142.545.631.178,06		
2016	1.005.681.962.716,00	241.983.753.198,00	80,45 %	19,35 %
	1.249.917.168.464,00	1.249.917.168.464,00		
2017	1.013.400.077.159,68	258.766.459.024,49	79,59 %	20,32 %
	1.273.152.920.188,17	1.273.152.920.188,17		
Rata-Rata			82,34 %	17,51 %

Sumber: Data diolah (2018)

Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen, sedangkan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5-20 persen. Berdasarkan tabel perhitungan dapat terlihat bahwa selama tahun 2013-2017 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Selama tahun 2013-2017 rata-rata belanja operasi sebesar 82,34% sedangkan untuk

belanja modal sebesar 17,51%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada belanja operasi dan belanja modal setiap tahunnya mengalami kenaikan. Menurut Mahmudi (2010:164) pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi.

4.3.5 Pembahasan

Ringkasan hasil penelitian mengenai Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Ringkasan Analisis Rasio Keuangan selama periode 2013-2017

No	Analisis Rasio Keuangan	Hasil Penelitian	Kriteria
1.	Derajat Desentralisasi	13,57%	Kurang
2.	Rasio Efektifitas	103,12%	Sangat Efektif
3.	Rasio Efisiensi	92,59%	Kurang Efisien
4.	Rasio Kecerahan Belanja:		
	a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	82,34%	Cukup baik
	b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	17,51%	Cukup baik

Sumber: Data Diolah (2018)

1. Derajat Desentralisasi

Menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan Desentralisasi. Derajat Desentralisasi Kabupaten Kulon Progo menunjukkan angka rata-rata 13,57% sehingga dapat dikatakan rendah. Hal ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2010:142) bahwa semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Desentralisasi.

2. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen. Rata-rata Rasio Efektifitas pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu 103,12% maka, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengelola pajak telah efektif.

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dianggap efisien apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%, jika lebih maka telah terjadi pemborosan anggaran. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama lima tahun (tahun 2013-2017) belum efisien karena secara umum menunjukkan angka rata-rata 92,59%. Hal ini mengindikasikan Kinerja Keuangan belanja Pemerintah sudah baik tetapi harus ditingkatkan kembali.

4. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian Belanja Daerah terbagi menjadi dua rasio yaitu: Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Modal terhadap

Total Belanja. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen, sedangkan proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5-20 persen. Selama tahun 2013-2017 rata-rata Belanja Operasi sebesar 82,34% sedangkan untuk Belanja Modal sebesar 17,51%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi.

STIE Widya Wiwana
Jangan Plagiat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2017 cukup baik, untuk masing-masing ukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kinerja Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Pemkab Kulon Progo selama tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan rendah dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 13,57%.
- b. Dilihat dari Efektifitas Keuangan Daerah pada tahun 2016 masih kurang baik karena dalam perbandingan antara penerimaan dan target menunjukkan angka 81,80% masih belum memenuhi syarat minimal 100%. Dilihat dari rata-rata Efektifitas selama lima periode penerimaan target pajak daerah telah efektif dengan rata-rata sebesar 103,12%.
- c. Kinerja Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilihat dari Efisiensi Belanja, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kurang efisien dalam menggunakan anggaran belanja pada periode 2013-2017. Rata-rata Efisiensi Belanja selama lima periode (tahun 2013-2017) sebesar 92,59%. Hal ini

menunjukkan Kinerja Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah baik namun perlu ditingkatkan kembali.

- d. Kinerja Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilihat dari rata-rata Keserasian Belanja periode 2013-2017 sebesar 82,34% untuk Keserasian Belanja Operasi. Pada tahun 2017 belanja operasi mengalami penurunan menjadi 79,59%. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan Belanja Operasi masih perlu diperbaiki lagi agar lebih baik di tahun berikutnya. Rata-rata untuk Keserasian Belanja Modal selama lima periode (tahun 2013-2017) sebesar 17,51%. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lumayan meningkat lebih baik tiap tahunnya. Dari Keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kulon Progo dalam memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal masih harus lebih ditingkatkan kembali agar lebih optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo karena PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan

daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

- b. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berada pada tingkatan kurang efisien, oleh karena itu pada tahun-tahun yang akan datang rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan lagi sehingga bisa mencapai tingkatan yang sangat efisien dengan rasio sekitar 60% kebawah.
- c. Pemerintah Daerah harus dapat memprioritaskan dana alokasi pada belanja operasi dan belanja modal agar kinerja keuangan Kabupaten Kulon Progo lebih optimal.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

Arif Nugroho, Akram (2012) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali APBD 2018-2010*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.

Assidiqi, Bahrhun (2014) *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten 2008-2012*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Belanja Daerah. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-belanja-daerah-definisi-dan.html> diakses 8 April 2018

Fungsi dan Jenis Anggaran. <http://makalah-xyz.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-fungsi-dan-jenis-anggaran.html>. diakses 4 April 2018

Keadaan Geografis Kulon Progo. <http://watespahpoh.net/2013/keadaan-geografis-kulonprogo.html> diakses 2 Agustus 2018

Kundalini, Pertiwi (2014) *Analisis Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Periode 2011-2012*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Mahsun, Mohammad, Sulistyowati, Firma dan Purwanugraha, Haribertus Andre (2011) *“Akuntansi Sektor Publik”* Edisi Ketiga Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Pengertian Analisis Rasio Keuangan.

<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-analisis-rasio-keuangan-dan.html>

diakses 10 April 2018

Pengertian Anggaran menurut definisi.

<http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-anggaran-menurut-definisi.html>

diakses 4 April 2018

Pengelolaan Keuangan Daerah.

[http://googleweblight.com/i?u=http://www.rejanglebongkab.go.id/pengelolaan-](http://googleweblight.com/i?u=http://www.rejanglebongkab.go.id/pengelolaan-keuangan-daerah/&hl=id-ID)

[keuangan-daerah/&hl=id-ID](http://googleweblight.com/i?u=http://www.rejanglebongkab.go.id/pengelolaan-keuangan-daerah/&hl=id-ID) diakses 2 April 2018

Wahyu Setyawan, Yudha (2013) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten*

Sragen Tahun Anggaran 2010-2012. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis jurusan

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.